

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Hotel maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta dirasa telah berhasil dijalankan dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta. Hal itu dibuktikan dengan antusias masyarakat maupun para investor untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel setelah jangka waktu peraturan tersebut selesai. Hasil yang didapatkan dalam sesi wawancara bersama pihak Emdi House Hotel mengatakan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta telah menjalankan Peraturan Walikota No.77 Tahun 2013 tersebut.

Kemudian terkait kejujuran dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga telah direalisasikan. Penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan

Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara menegakkan kode etik kepada seluruh jajaran pegawai dalam dinas dengan tujuan menciptakan suatu organisasi/instansi yang baik dan bersih.

4.1.2 Akuntabilitas Manajerial

Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien Dinas Penanaman Modal Dan Peizinan Kota Yogyakarta berfokus pada kualitas dan kuantitas pegawai, dengan cara memberi pembinaan, mengadakan rapat rutin untuk evaluasi, pendalaman materi, mengikuti bimbingan teknis, mengikuti diklat, mengikuti tugas belajar, serta memberikan izin belajar kepada pegawai sesuai dengan bidangnya. Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan cara peningkatan tunjangan terhadap pegawai. Hal itu dirasa penting untuk menciptakan semangat baru dalam menjalankan kinerjanya. Kemudian Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta juga berpegang teguh dengan Visi dan Misi organisasi dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang efektif dan efisien.

4.1.3 Akuntabilitas Program

Dalam menjalankan programnya, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengedepankan kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan, dan yang terpenting tidak memberatkan masyarakat ataupun investor dalam mengajukan perizinan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta mengeluarkan program perizian

secara online agar memudahkan masyarakat ataupun para investor untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga sebagai bentuk realisasi dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu terwujudnya pelayanan penanaman modal dan perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel.

4.1.4 Akuntabilitas Kebijakan

Tujuan diberlakukannya kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah menciptakan suatu pembangunan yang tertib, selaras, nyaman, serta aman baik untuk penghuni maupun lingkungan disekitarnya. Kemudian bentuk dari hasil Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel yang diberikan berupa menghidupkan suasana kepariwisataan dan dunia bisnis di Kota Yogyakarta, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat, kemudian bentuk negatifnya yaitu menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar kawasan hotel.

4.1.5 Akuntabilitas Finansial

Pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta secara ekonomis dilakukan dengan cara diberlakukannya sistem perizinan online. Dengan diberlakukannya sistem perizinan secara online membuat Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tidak perlu lagi menyediakan kertas, printer, dan lain sebagainya, dan itu berdampak pada pengurangan pengeluaran anggaran.

Kemudian untuk menciptakan penggunaan APBD secara efektif, Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan dengan cara mengurangi belanja pegawai yang dirasa tidak perlu dan masih bisa ditutupi oleh pegawai lain yang tentu sesuai dengan tupoksinya. Itu bertujuan agar mengurangi pemberian gaji serta tunjangan kepada pegawai baru.

Selanjutnya untuk menggunakan APBD secara efisien dilakukan dengan cara melakukan plotting dengan jangka waktu hanya sebulan, yang jangka waktu sebelumnya adalah per-tiga bulan. Cara tersebut lebih mudah dan maksimal dalam mengelola APBD yang ada karena mempunyai jangka waktu yang lebih singkat dan itu mempermudah dinas dalam mengelola APBD. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk melihat kembali apa saja yang menjadi hambatan dalam menjalankan APBD.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas adapun rekomendasi yang diberikan, antara lain:

- 4.2.1 Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai dalam Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Kemudian peningkatan fasilitas dalam dinas juga perlu dilakukan, seperti tersedianya koneksi internet untuk masyarakat yang datang ke dinas agar terciptanya suatu kenyamanan dalam

lingkungan dinas. Selanjutnya yang terakhir adalah interkoneksi antara instansi perlu di tingkatkan lagi agar tercapai suatu kerja sama yang baik.

4.2.2 Kemudian diharapkan kepada penelitian berikutnya untuk melakukan pengembangan inovasi terhadap penelitian sejenis ini agar pengembangan ilmu terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel menghasilkan banyak referensi untuk para pembaca.